

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPS Terhadap Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus Pada DPRD Se- Provinsi Bengkulu, Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta).
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coryanata dan Isma.2007.Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Ferdinand, Augusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Upgrade Pls Regresi. Semarang. BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam.2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam 2006. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Indradi, 2001. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Univeristas Brawijaya Malang.
- Juliastuti, A. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Online), (<http://unp.ac.id>, diakses 29 April 2013).
- Muhammad, 2011, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo JawaTengah)". Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi.
- Pusdianto dan Sahid, 2008. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. Metodologi penelitian. Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2011).

- Pramita dan Andriyani, 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium UMM XIII. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rangkuti. F. 1997. Analisis SWOT Teknik Membeda Kasus Berorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad Ke-21. Jakarta (Id) : Gramedia.
- Ramang dan Andriana Jurusan, 2016. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember) Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Rosseptalia dan Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sutarnoto, 2002. Pengaruh Kualitas SDM Aparatur Terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang.
- Supranto, 1998. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sopannah, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Makalah Symposium Nasional Akuntansi V. Semarang
- Sopiah. 2008. Dukungan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government* Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sudiarta, 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiri pada Lembaga DPRD Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume: 2 No. 1 Tahun 2014.
- Sugiyono, 2007. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta Bandung
- Syamsiar, 2001. Hubungan Kualitas Anggota DPRD Terhadap Partisipasinya Dalam Proses Kebijakan Daerah Di Kabupaten Malang, Laporan Penelitian Dalam Jurnal Ilmiah, Vol. 13, no. 2, Malang
- Utama, Maulana Hardia. 2015. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Akuntansi.
- Utami dan Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol 1, No. 1 April.

Padang.

Winarna & Murni, 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Werimon, Simson, Ghozali, Imam, dan Nazir, Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Studi empiris di Provinsi Papua. Tesis Studi Empiris di kota Semarang.

Yudhoyono Bambang, 2002. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela_3.htm.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan 343 Ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Mempunyai Tugas Dan Wewenang Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemendagri No.37 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (1), Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah